

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMANFAATAN TIK BAGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH

THE GOVERNMENT POLICY OF KUNINGAN DISTRICT IN THE ICT UTILIZATION FOR DEVELOPMENT OF LOCAL TOURISM

Mulyono Yalia

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung
Jalan Pajajaran No. 88 Bandung-Jawa Barat, Indonesia

email : mulyonoyalia@gmail.com

(Diterima: 24 September 2014; Direvisi: 29 Oktober 2014; Disetujui terbit: 7 November 2014)

Abstrak

Perkembangan TIK yang sudah maju belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah, hal ini disebabkan oleh terkendalanya SDM yang akan menangani *website* kantor Dinas Kepariwisata Daerah di Kabupaten Kuningan. Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 dan Inpres RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* serta Inpres RI No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia bahwa untuk mendorong terjadinya pemerataan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia harus ditunjang oleh sarana penunjang pembangunan di antaranya telekomunikasi dan informatika (telematika) dan perda yang mengatur penggunaan TIK bagi kepariwisataan. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Kecenderungan jawaban responden menunjukkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan fungsi Dinas Kepariwisata Kebudayaan Kabupaten Kuningan, berdasarkan pendapat responden diketahui bahwa seringkali informasi kebijakan pemanfaatan TIK ini yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan maupun panduan kegiatan diperoleh kurang lengkap.

Kata kunci : kebijakan pemerintah, pemanfaatan TIK, pariwisata daerah.

Abstract

The development of advanced ICT can not be used by the local government district in order to develop the local tourism of Kuningan District, this is caused by the need to control human resources website that will handle local tourism office in The Kuningan District. As the same way with the direction of government policy in national development programs (propenas) in 2000 and the Presidential Decree No. 3 of 2003 on The Development of National Policies and Strategies of E-Government and The Indonesian Presidential Instruction No. 6 of 2001 on The Development and Utilization of ICT in Indonesia that to push for distribution throughout the territory of the increase in the construction of the Republic of Indonesia should be supported by means of supporting such development of telecommunications and informatics (telematics) and regulations governing the use of ICT for tourism. Kuningan District Regulation No. 7 of 2009 on The Tourism Development Master Plan of Kuningan District. The tendency of respondents indicates that in the context of the implementation of official functions of The Tourism and Culture Agency Kuningan District, based on the opinion of respondents note that often the information policy on the use of ICT is related to guideline implementation or obtained less than complete activity guide.

Keywords : government policy, ICT utilization, local tourism.

PENDAHULUAN

Pesatnya kegiatan kepariwisataan dunia telah menjadikan objek kepariwisataan sebagai aspek penting

dalam mendapatkan devisa negara, maupun dalam pengembangan infrastruktur di daerah sampai ke masalah hubungan internasional. Perkembangan

industri pariwisata saat ini sudah sedemikian maju. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tetapi sayang masih banyak dinas kepariwisataan daerah di Indonesia yang belum memanfaatkan teknologi ini secara maksimal dimana konsep ini lebih dikenal sebagai *e-tourism*. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah informasi pemasaran kepariwisataan ke seluruh penjuru dunia, sehingga informasi ini bisa dengan mudah diakses oleh para penikmat pariwisata untuk menentukan objek yang akan dikunjunginya. Pemanfaatan teknologi ini oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan suatu daerah baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam program pembangunan nasional (propenas) Tahun 2000 dan Inpres RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Inpres RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia bahwa untuk mendorong terjadinya pemerataan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia harus ditunjang oleh sarana penunjang pembangunan di antaranya telekomunikasi dan informatika (telematika).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Peraturan Daerah No.29/2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Tujuan dari pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan

pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika. Peraturan daerah tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh Satker/OPD, dimana setiap satker harus sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal tidak terkecuali Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan yang juga telah memiliki perda yang mengatur penggunaan TIK bagi kepariwisataan. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Dengan slogan promosi *wonderful Indonesia*, saat ini Indonesia sedang gencar melaksanakan promosi kepariwisataan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan dan berusaha memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global dengan tetap memperhatikan dan melindungi nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Permasalahan pokok dari penelitian ini dirumuskan bahwa kebijakan pemanfaatan TIK dalam implementasinya belum optimal sehingga belum memberikan pengaruh dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan Jawa barat ini.

LANDASAN TEORI

Salah satu pendekatan studi implementasi kebijakan adalah dengan pendekatan *Implementation Problem Approach*. Menurut Edward III terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Ke empat

faktor tersebut antara lain komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku birokrasi, dan struktur birokrasi. Kesemuanya memengaruhi implementasi kebijakan secara simultan dan berinteraksi satu sama lain. Proses implementasi kebijakan baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun serta dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran sasaran tersebut. Beberapa ahli mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan lebih penting dari seluruh kegiatan proses kebijakan (Wahab 1990, 45). Kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata didasari oleh pemahaman akan pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta kontribusinya bagi perekonomian negara. Alasan lain yang menjadikan kebijakan pariwisata sebagaimana dikemukakan banyak pakar (Suwanto 1997, 42) adalah:

1. Pariwisata sering dianggap sebagai sumber penting dari *hard foreign exchange earnings* (pendapatan nilai tukar mata uang asing).
2. Sebagai industri ekspor pariwisata tidak menghadapi aturan perdagangan dan kuota sebagaimana halnya barang-barang pabrikan, bahan mentah, dan produksi produk pokok kebutuhan dasar.
3. Wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam seperti iklim, sejarah, dan kebudayaan yang secara ekonomi mempunyai *marginal cost* rendah.
4. Pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di negara berkembang maupun negara yang sudah maju.
5. Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan jasa dan

produk, pariwisata dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lainnya seperti akomodasi dan infrastruktur lainnya.

Salah satu faktor pendorong majunya industri pariwisata adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terkenal dengan istilah *Information and Communication Technology* (ICT) atau TIK. Pada berbagai hal perkembangan TIK telah banyak memberikan perubahan termasuk peluang-peluang baru yang sangat berarti dari kemajuan. TIK adalah peluang publikasi dan promosi paket-paket wisata ke seluruh dunia menggunakan Internet sehingga jarak dan waktu sudah tidak lagi menjadi kendala yang berarti dalam publikasi dan promosi. Situs web Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan saat ini adalah www.wisatakuningan.com, *website* tersebut secara resmi berdiri tahun 2010 sebelumnya mereka masih bergabung ke situs web pemerintahan Kabupaten Kuningan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Peraturan yang memayungi penyelenggaraan pengelolaan *website* Kabupaten Kuningan adalah Permen Kominfo No. 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain *go.id* untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah, Perda Provinsi Jawa Barat No. 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*), menggambarkan serta mengkaji keberadaan peran Dinas Pariwisata Daerah sebagai usaha meningkatkan kepariwisataan di daerah

(Sugiyono 2005). Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam dengan tiga orang pejabat struktural pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan yaitu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengembangan Objek Wisata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan TIK Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan TIK/*website* pada sektor kepariwisataan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diukur atas jawaban yang menggambarkan kecenderungan jawaban hasil wawancara dengan responden tentang informasi yang diterima, pemahaman para pelaksana, intensitas penyampaian informasi, materi informasi serta konsistensi penyampaian informasi. Transmisi adalah proses penyampaian kebijakan melalui serangkaian aktivitas terencana dan sistematis dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Beberapa hambatan tersebut di antaranya pertentangan antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, birokrasi yang berlapis-lapis, kemampuan penangkapan pelaksana kebijakan serta proses penyampaian. Kecenderungan jawaban responden pada indikator-indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pada aspek konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan TIK/*website* masih perlu ditingkatkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan Edwards :*"..... must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors"*, maka tidak sempurnanya aspek komunikasi akan menyebabkan para pelaksana kebijakan menafsirkan kebijakan sesuai dengan persepsinya sendiri (Edwards 1980, 17).

Kecenderungan jawaban responden menunjukkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan fungsi Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, berdasarkan pendapat responden diketahui bahwa seringkali informasi kebijakan pemanfaatan TIK ini yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan maupun panduan kegiatan diperoleh kurang lengkap. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakjelasan tentang informasi apa dan bagaimana isi kebijakan baik yang menyangkut regulasi kelembagaan, prosedur, maupun sistem acuannya. Selain itu, informasi yang diperoleh para pelaksana kebijakan seringkali kurang akurat sehingga mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hambatan dan distorsi komunikasi tersebut hendaknya dapat dikurangi kadarnya, karena semakin banyak yang harus dijangkau dengan komunikasi maka akan semakin besar kemungkinan kehilangan makna yang dimaksudkan oleh kebijakan. Begitu pula semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati, maka semakin besar peluang bagi diabaikan dan terdistorsinya makna kebijakan. Untuk itu, semakin baik dikembangkan saluran-saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-perintah

implementasi, akan memberikan akses positif terhadap tingkat probabilitas perintah-perintah kebijakan untuk diteruskan dengan benar.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan TIK Daerah

Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang penting meliputi staf dengan jumlah yang sesuai serta keahlian yang memadai, informasi yang relevan mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan, kewenangan, dan fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan. Kecenderungan jawaban responden pada indikator-indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Secara konseptual, kurangnya sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980) bahwa;.... *lack of the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to ineffective*" (Edwards 1980, 17).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir pada seluruh komponen sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, peralatan, kewenangan, dan fasilitas belum berlangsung optimal. Masalah keuangan, sebagaimana diindikasikan oleh kebanyakan institusi pemerintahan selalu dihadapkan pada kondisi yang kurang memadai. Namun demikian, tidak berarti bahwa para penentu kebijakan tidak berdaya menghadapi kondisi ini. Sekalipun dihadapkan pada kondisi keterbatasan, upaya untuk

memberdayakan sumber daya keuangan yang ada serta kemungkinan peningkatan sumber-sumber melalui berbagai jalur perlu ditingkatkan. Pemerataan proporsi melalui program-program yang relevan kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusinya. Pada konteks sumber daya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan. Rekrutmen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung kinerja optimal seringkali dihadapkan pada kepentingan-kepentingan berbagai pihak, sehingga kurang memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya latihan atau *training* terhadap personil serta kesulitan untuk mempertahankan personil yang kompeten merupakan indikator indikator lain yang memperkuat kurang terpenuhinya aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pemanfaatan TIK ini, bahkan rotasi sumber daya manusia pengelola TIK tidak didasarkan pada kebutuhan dinas yang bersangkutan sehingga konten kepariwisataan daerah yang seharusnya di *up-date* setiap waktu menjadi terbengkalai karena petugas baru kurang memahami dalam pengisian konten kepariwisataan di Kabupaten Kuningan.

Dalam penerapan teknologi, tidak hanya objek-nya (perangkat keras) saja, namun juga manusia yang akan menggunakan, informasi yang terkandung di dalamnya dan kelembagaan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Pengembangan *human resources* melalui kegiatan untuk meningkatkan keterampilan

sumber daya manusia di bidang pariwisata, seperti pelatihan ataupun kerja praktik di beberapa pusat-pusat pelatihan dan industri pariwisata merupakan salah satu solusi alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Keterbatasan fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan indikator lain dari sumber daya yang belum terpenuhi secara optimal. Kekurangan sarana fisik di antaranya adalah sarana IT yang memadai. Peningkatan kualitas maupun perlengkapan sarana yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pelayanan merupakan bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan maupun memutuskan kebijakan selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan, mengingat implikasinya pada mutu pelayanan yang dapat diberikan serta dampak yang ditimbulkan bagi pengembangan sektor pariwisata daerah.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan TIK

Dimensi disposisi atau kecenderungan –kecenderungan perilaku para pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang memengaruhi pelaksanaan implementasi TIK bagi kepariwisataan ini, dimana dimensi ini akan sangat menentukan sikap untuk mendukung kebijakan implementasi ini atau menolak kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk mengukur dimensi disposisi digunakan 6 indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman tugas aparat dalam pekerjaan pengembangan TIK.
2. Kemampuan melaksanakan tugas dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK.
3. Kerjasama tim pengelola *website*/TIK sektor kepariwisataan sesuai dengan prosedur pelaksanaan agar mendapat hasil yang maksimal.

4. Konsistensi aparat dalam pelaksanaan tugas masing masing.
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi program selalu mengutamakan tujuan dan sasaran program pengelolaan TIK/*website*, pengelola atau pelaksana harus komitmen terhadap tugasnya.
6. Sistem informasi kepariwisataan Kabupaten Kuningan yang dikembangkan menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta didukung dengan berbagai fasilitas.

Pengelolaan TIK/*website* kepariwisataan digunakan untuk memudahkan fleksibilitas produksi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan dan mengoptimalkan proses demi kepuasan masyarakat pengguna informasi kepariwisataan.

Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah faktor yang secara signifikan dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan memiliki dua karakteristik utama yaitu prosedur standar pengorganisasian dan fragmentasi, dan fragmentasi sendiri merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Edwards (1980). Untuk mengukur dimensi struktur birokrasi digunakan indikator sebagai berikut:

1. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan sesuai dengan struktur sehingga pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan pemanfaatan TIK bagi kepariwisataan dapat berjalan secara maksimal.

2. Koordinasi antarunit kerja yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Kuningan berlangsung sinergis.
3. Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan di bidang TIK/*website* berjalan sesuai dengan alur proses kebijakan.
4. Sistem pengelolaan TIK/*website* terencana dengan alur proses kebijakan Dinas Pariwisata.
5. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan TIK/*website* disesuaikan dengan alur proses kebijakan.
6. Sistem informasi kepariwisataan berbasis web, menjembatani hubungan antara pemerintah, industri bisnis, masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Fokus aplikasi teknologi dalam *website* pariwisata adalah jaringan kerja, komunikasi, dan penciptaan nilai yang global.
8. Pengelolaan sistem informasi dan layanan kepariwisataan yang dikelola dalam *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak dinas lainnya untuk saling melengkapi kebutuhan akan kepariwisataan di daerah Kuningan, juga dengan pihak pelaku usaha jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, biro perjalanan, maupun pelaku usaha seni.

Koordinasi dengan para *stakeholders* yang berlangsung ideal merupakan indikator dari struktur birokrasi yang mendorong terlaksananya kebijakan secara efektif. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dengan koordinasi yang efektif akan

mempermudah pelaksanaan kebijakan maupun peningkatan mutu pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi institusi Dinas Kepariwisata Kabupaten Kuningan, serta tujuan kebijakan yang telah digariskan. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait serta pembinaan pada masyarakat merupakan hal penting yang selayaknya ditingkatkan intensitas maupun kualitasnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dibutuhkan pengelolaan yang terencana melalui petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang telah disusun sedemikian rupa untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Mengacu pada jawaban responden tentang struktur birokrasi menunjukkan bahwa kejelasan prosedur dan tugas-tugas prosedur pengoperasian secara standar belum optimal. Disamping itu hambatan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas yang memadai, dan koordinasi dengan institusi lain juga masih belum optimal. Hambatan birokrasi, pembagian tugas maupun mekanisme pertanggung jawaban yang rancu akan menyulitkan terlaksananya kebijakan secara efektif. Begitu juga dengan terbatasnya kewenangan baik personil pelaksanaan maupun institusi dengan sendirinya akan menghambat kinerja optimal dari aparatur terkait dalam mengembangkan berbagai program maupun kegiatan yang relevan dengan kepariwisataan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pada Sektor Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Pengelolaan pariwisata berbasis teknologi informasi identik dengan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran kepariwisataan sebagai salah satu pendorong majunya industri kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Saat ini kemampuan teknologi informasi dalam dunia kepariwisataan dikenal dengan nama *e-tourism* atau elektronik pariwisata. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan TIK bagi pengembangan kepariwisataan daerah merupakan peluang baru yang sangat berarti dalam melakukan publikasi dan promosi paket-paket wisata daerah ke seluruh dunia, dengan menggunakan Internet sehingga jarak dan waktu sudah tidak lagi menjadi kendala yang berarti, dengan adanya media Internet ini sehingga dapat meningkatkan daya guna dan daya saing dalam memberikan jasa layanan pariwisata kepada para *customer* dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggara pemasaran pariwisata mudah diakses oleh para calon wisatawan.

Pengembangan dalam penerapan elektronik pariwisata saat ini telah bergerak pada pemutakhiran data-data yang diperlukan untuk mempermudah para calon wisatawan dengan cara pengelolaan sistem informasi terpadu atau *Destination Management Organisation* (DMO). Dengan adanya DMO ini dilaksanakan secara terpadu antara lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi profesi, dan unsur-unsur masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan kepariwisataan, dan diharapkan dengan berjalannya DMO ini terjadi keseimbangan pembangunan wilayah. Pengembangan DMO sebagai bentuk baru dalam pengelolaan pariwisata daerah menjadi penting bagi pemanfaatan ICT untuk pariwisata.

Melalui pemanfaatan TIK/Internet setiap pengelola dapat mempromosikan

dan menawarkan berbagai macam produk atau paket-paket pariwisata, baik wisata alam, wisata budaya atau seni secara tidak terbatas, serta mudah diakses. Jaringan virtual ini menciptakan rantai nilai ekonomi yang terhubung antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya dalam kerangka industri pariwisata di Kabupaten Kuningan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan di TIK kepariwisataan di Kabupaten Kuningan belum berlangsung efektif ditinjau dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan:

1. Aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan oleh institusi di bidang kepariwisataan berdasarkan indikator-indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi belum optimal dalam implementasi kebijakan sehingga menyebabkan belum efektifnya pemberian pelayanan informasi kepada publik.
2. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan berdasarkan indikator-indikator sumber daya manusia, peralatan, kewenangan dan fasilitas kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan belum optimalnya pelayanan informasi kepada publik.
3. Disposisi dalam implementasi kebijakan kepariwisataan berdasarkan indikator-indikator kecenderungan sikap para pelaksana dalam mengekspresikan dukungannya terhadap kebijakan.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berdasarkan indikator-indikator mekanisme prosedur serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban

kebijakan kurang memadai menyebabkan belum optimalnya pelayanan informasi kepada publik.

Selain itu, pelaksanaan fungsi TIK kepariwisataan yang meliputi pengukuran masukan (*input*), pengukuran keluaran (*output*), pengukuran hasil (*outcome*), pengukuran manfaat (*benefit*), dan pengukuran dampak (*impact*) belum berlangsung optimal sehingga fungsi TIK kepariwisataan belum berlangsung efektif di wilayah penelitian:

1. Pada aspek pengukuran masukan dapat disimpulkan bahwa dinas pengelola kepariwisataan Kabupaten Kuningan Jawa Barat belum dapat menampilkan diri dengan baik pada masyarakat maupun institusi lain dalam lingkup organisasi pemerintahan daerah.
2. Pada aspek keluaran dapat disimpulkan bahwa khalayak sasaran belum dapat menerima, memerhatikan, memahami serta belum mampu mengingat pesan yang diberikan dinas pengelola kepariwisataan dengan baik.
3. Pada aspek pengukuran hasil (*outcome*) diketahui bahwa pesan dan materi komunikasi yang dihasilkan oleh dinas pengelola kepariwisataan daerah Kabupaten Kuningan belum dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan.
4. Pada aspek dampak, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mendapatkan manfaat dari informasi melalui media cetak, media elektronik khususnya media lokal yang memuat banyak informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly, Inc., 1980.
- Gunawan, Myra Dkk. *Draf UU tentang Kepariwisataan*. Naskah Akademik, Tidak dipublikasikan, 2006.
- Gunawan, Myra P. "Tourism Technology." Poster paper, 1995.
- Jafari, Jafar. *Encyclopedia of Tourism, Routledge, London Swiss-Indonesia Forum on Culture and International Tourism*. Yogyakarta, 2000.
- N., Dunn William. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003.
- Sevilla, Consuella. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- UNWTO. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations*. Madrid: UNWTO, 2004.
- Wahab, Salah. *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987.